

## PERKEMBANGAN NASIONALISME DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Darwin Une

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

**Abstrak:** Dalam pembabakan sejarah, awal abad ke-20 disebut sebagai fase sejarah Indonesia modern atau lebih dikenal bangkitnya nasionalisme di Indonesia. Dalam konteks sejarah Indonesia modern, nasionalisme diberi kualifikasi modern pula, bahkan untuk Indonesia diletakkan dalam bingkai perikemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab nasionalisme “kuno”, seperti banyak dikuatirkan orang, adalah ekstensi faham kesukuan atau tribalisme yang sempit dan sewenang-wenang terhadap suku lain. Sedangkan nasionalisme modern adalah faham tentang hak bagi suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, dan karena itu anti imperialisme, jadi konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nasionalisme modern telah melahirkan kestabilan dan berfungsi sebagai kekuatan yang menyatukan suku-suku dan kelompok-kelompok etnis yang terpisah-pisah. Oleh karena itu pula nasionalisme merupakan unsur esensial bagi pembangunan bangsa (*nation building*) untuk Indonesia, sebuah bangsa dan negara yang fragmentasi etnis dan kesukuan, meski unsur-unsur perbedaan sosio-kultural selalu merupakan ancaman bagi stabilitas dan pembangunan bangsa tersebut. Unsur-unsur tersebut di era globalisasi dewasa ini mulai nampak mengarah pada nasionalisme perspektif lokal.

**Kata-kata kunci:** nasionalisme, tribalisme, imperialisme, dan demokrasi

Di awal pergerakan nasional hingga terbentuknya negara kesatuan RI 1945, nasionalisme dipandang sebagai pembangkit semangat kebangsaan. Di era globalisasi ini nasionalisme seharusnya diharapkan tetap berperan sebagai perekat semangat kebangsaan, pada kenyataannya belakangan ini tak lagi tampil sebagai suatu landasan untuk membangun persatuan bangsa, menjaga keutuhan negara kesatuan, melainkan yang muncul adalah ancaman perpecahan akibat semangat primordialisme yang masih berada di level ke kanak-kanakan.

Di era globalisasi ini, tampaknya nasionalisme bukan lagi merupakan unsur pengikat untuk membangun kehidupan bersama (*living together*) di antara berbagai komunitas di suatu negara, tetapi hanya bisa tampil seperti

dua sisi dari sebuah mata uang, politik dan etnik. Fukuyama (2004: 12) mengatakan bahwa di negara-negara demokrasi pun nasionalisme bukan lagi merupakan perekat untuk menjalin kekuatan kebangsaan dalam arti sebagai "potensi untuk melawan musuh bersama" seperti dimasa dahulu ketika mau membangun bangsa melalui proses Sumpah Pemuda. Dan yang amat menyedihkan, mereka yang mengaku nasionalis justru telah kehilangan roh nasionalismenya. Nasionalisme hanya menjadi potret kuno yang menarik bagi anak-anak masa kini untuk ditonton.

Dalam konteks pengertian negara bangsa (*national state*), nasionalisme mendapat tantangan yang semakin kuat akibat proses globalisasi dengan menguatnya sikap etnisitas dan laku keagamaan. Daniel Bell dalam *The End Of Ideology* menyebutkan "Nasionalisme sebagai ideologi telah berakhir" (Sasongko2005: 39).

### **Nasionalisme dalam Perspektif Global**

Seperti dikuatirkan oleh banyak orang terhadap nasionalisme kuno adalah ekstensi paham kesukuan atau tribalisme yang sempit dan sewenang-wenang terhadap suku lain. Tribalisme atau kesukuan adalah kepercayaan akan kesetiaan pada sesama jenisnya sendiri, yang didefinisikan oleh etnisitas, bahasa, budaya, agama sebagai titik tolak dari nasionalisme baru. Dalam karyanya *Global Paradox* (1994: 21)), Naisbitt menyebut nasionalisme baru bertitik tolak dari etnisitas *chauvinistic* itu sebagai "*new tribalism*" (perkauman/perpuakan baru). *Chauvinisme* tribalisme baru ini secara sempurna mewujudkan diri dalam berbagai bentuk kebrutalan, perkosaan, pembunuhan dan berbagai bentuk "*ethnic cleansing*" di wilayah bekas Yugoslavia.

Dalam perspektif sejarah kuno tidak diketahui secara pasti mengenai konsep nasionalisme, tetapi tokoh-tokoh yang bisa disebut sebagai pencetus teori nasionalisme telah muncul sekitar abad ke XVIII, seperti Von Herder (1774 – 1803), Rousseau (1712 -1778). Mereka ini sering disebut sebagai nabi negara nasional, dengan teorinya tentang bangsa, serta Fiederich Hegel (1770 -1831) yang terkenal dengan teorinya tentang negara" (Fukuyama 2004: 3).

Von Herder (1774 – 1803) mengatakan bahwa, kebutuhan pokok manusia untuk menjadi anggota suatu kelompok setidaknya-tidaknya pada suatu tingkat kelompok itu merupakan bangsa. Dengan menjadi bagian dari suatu bangsa, maka nasionalisme memberikan kita suatu identitas, bangsa kita mempunyai masa lalu, suatu sejarah nenek moyang "akar-akar" yang menempatkan kita dalam suatu tradisi. Lebih lanjut dikatakan Johan

Gottfried von Herder bahwa “kebutuhan manusia yang paling mendasar ialah membentuk suatu kelompok”. Pada tingkatan tertentu kelompok ini adalah bangsa. Suatu bangsa terbentuk melalui “arus tradisi yang terdiri dari satu wilayah, satu sejarah, satu bahasa dan sering satu agama”(dalam, Maarif 1989: 7).

Manusia adalah makhluk sosial yang kecenderungannya untuk mau membentuk kelompok, dan dari kelompok akhirnya terciptalah suatu masyarakat yang besar yang disebut bangsa atau nasion. Hertz (dalam, yang Sargent, 1987: 21) mengatakan bahwa proses untuk menjadi suatu bangsa, pembangunan bangsa, sering dinamakan proses peleburan atau pepaduan seluruh hal tersebut ke dalam suatu kesatuan yang menyeluruh, proses ini melahirkan masyarakat.

Semangat nasionalisme yang berdasarkan pandangan kuno menyebutkan adanya penyatuan dari unsur-unsur: (1) rasa kekeluargaan, (2) hubungan yang erat dengan sekelompok orang dengan orang lain atau suatu perasaan asing dari kelompok lain, dan (3) rasa terikat pada suatu kekuasaan (Denny J.A, 2002: 29). Pengikat dari unsur-unsur tersebut adalah adat, dongeng mitos, dan terpenting adalah bahasa yang sama. Selanjutnya hilang ikatan nasionalisme kuno dikarenakan oleh beberapa sebab misalnya, tumbuhnya peradaban yang menuntut cara hidup baru dari pengembara, dari berburu, menjadi menetap dan bertani, kemudian melakukan organisasi hingga muncul persatuan dengan keluarga atau suku yang lain. Tersebarlah kelompok-kelompok kesukuan secara cepat dan besar-besaran dengan damai, tetapi saat tertentu adanya penaklukan suku yang besar terhadap suku yang kecil, kemudian berdirilah dinasti dan timbul masyarakat feodal. Kesetiaan suku diganti dengan kesetiaan kepada dinasti.

Nasionalisme modern kemudian berkembang untuk mewujudkan prinsip orang dan bangsa sama-sama memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Menurut Denny J.A (202: 30) nasionalisme modern berarti sepenuhnya bebas dalam hubungannya dengan negara-negara lain, sekaligus bangsa harus memberi kebebasan kepada warganya. Sedangkan Hans, (1984: 89) nasionalisme modern baru nyata dengan kedudukan Inggris memimpin Eropa pada abad ke 17. Berbeda dengan Maarif (1989: 20) yang mengemukakan bahwa munculnya sekelompok negara-negara kuat di Eropa abad ke 16, seperti Inggris, Prancis, Spanyol, Portugal dan lain sebagainya lebih merupakan ambisi para raja dan bukan menandakan munculnya nasionalisme. Dengan demikian di Eropa nasionalisme ditandai dengan adanya transisi dari masyarakat feodal ke masyarakat industri. Proses peralihan itu terjadi pada abad XVII yang didahului oleh kapitalisme awal

dan liberalisme. Kekuasaan feodal dengan raja, bangsawan, dan Gereja lambat laun tidak mampu menghadapi desakan dari golongan baru di kota-kota yang menguasai perdagangan dan industri. Terjadilah kerjasama antara penduduk kota pemilik modal dalam memajemen industrinya dan cendekiawan dengan penemuannya berupa teknologi modern. Perkawinan keduanya menghasilkan revolusi baru dalam cara berproduksi, yang dikenal dengan “revolusi industri”.

Kekuasaan kaum feodal mulai surut dan digantikan oleh para borjuis kota. Mereka tidak mau terikat oleh ketentuan-ketentuan dalam masyarakat agraris, tetapi mereka ingin bebas melakukan usaha, bersaing dan mencari keuntungan sebanyak mungkin. Fahaman inilah yang kemudian melahirkan apa yang dikenal dengan liberalisme. Kaum borjuis dengan revolusi industrinya itu kemudian berkembang di Eropa Barat. Di tengah-tengah keadaan seperti itulah lahirlah nasionalisme Eropa Barat.

Nasionalisme tersebut kemudian membangun kesadaran adanya perbedaan antar bangsa di Eropa Barat. Nasionalisme seperti itu tumbuh menjadi satu aliran yang penuh emosi dan sentimen, kecongkakan dan *chauvinisme*, sehingga nasionalisme Eropa Barat melahirkan kolonialisme, yaitu nafsu mencari jajahan di luar benua sendiri.

Ahli-ahli lain terkemuka yang berpandangan tentang nasionalisme, seperti Daniel Bel dan Habsbawm (1992: 192) berargumen bahwa “nasionalisme tengah bangkit kembali. Fukuyama (2004: 10) berargumen tentang “kebangkitan nasioanlisme baru”. Ia mengakui bahwa nasionalisme tidak lagi menjadi kekuatan signifikan dalam sejarah khususnya di negara-negara demokrasi Eropa Barat dan Amerika Serikat. Lebih dari itu dia mengatakan bahwa; “nasionalisme baru lebih bersifat politis, cenderung ke primitif dan bersifat tidak toleran karena secara intelektual ia memang agresif dan bahkan *chauvinistik* karena berpijak pada etnisitas dan rasionalisme sempit”.

Pada pertengahan abad ke 18 nasionalisme modern mendapat landasan intelektual yang kokoh pada teori Rousseau tentang bangsa dan teori Hegel tentang negara. Rousseau mengatakan bahwa seorang individu tidak punya makna sama sekali dalam negara nasional (Maarif, 1989: 28). Ide nasionalisme yang didasari warisan Yunani kuno dibangkitkan kembali. Sementara itu Hegel mengatakan fungsi negara sebagai Tuhan. Negara memiliki kualitas spritual sehingga seorang individu hanya mengadili, merealisasikan dirinya, mencapai kesempurnaan, menjadi bebas bila tunduk secara total kepada negara, negara adalah gagasan ketuhanan sebagaimana “ia berwujud dimuka bumi” (*dalam*, Fukuyama 2004: 17).

Perkembangan nasionalisme di Eropa Barat membangkitkan kesadaran bangsa yang *chauvinistik* dan kemudian melahirkan kolonialisme dan imperialisme bagi negara-negara di luar Eropa. Pada abad ke-20 nasionalisme yang berkembang di Eropa Barat itu tersebar ke dunia dan menjadi pengungkit perubahan yang terbesar dewasa ini. Sebagai buktinya adalah kebangkitan Nasionalisme di negara-negara Afrika dan Asia termasuk Indonesia. (Abdulgani 1964: 177).

### **Bangkitnya Nasionalisme di Indonesia**

Umumnya bangkitnya Nasionalisme Asia dan khususnya Nasionalisme di Indonesia, berbeda dengan timbulnya nasionalisme di Eropa. Nasionalisme di Indonesia mempunyai kaitan erat dengan kolonialisme Belanda yang sudah beberapa abad lamanya berkuasa di bumi Indonesia. Abdulgani (1964: 16 ) mengatakan bahwa “Nasionalisme Indonesia sebagai reaksi terhadap kolonialisme”, karena apa yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia melalui suatu kebangkitan adalah untuk mau menenyapkan bentuk kekuasaan penjajah.

Beberapa pendapat yang dikutip oleh Kansil (1984: 14 ) seperti Verdom (1990) mengatakan bahwa : “nasionalisme mempunyai tujuan untuk menenyapkan tiap-tiap bentuk kekuasaan penjajah dan mencapai suatu keadaan yang memberi tempat untuk perkembangan merdeka bangsa Indonesia”. Selain itu Bouman mengatakan bahwa “Nasionalisme Indonesia adalah perasaan menjadi anggota masyarakat besar yaitu bangsa Indonesia, tetapi syarat mutlak untuk mencapai maksud itu ialah dengan menenyapkan sistim kolonialisme yang menekan bangsa Indonesia dalam keadaan buruk”. Dari beberapa pendapat ini, tampaknya ada persamaan konsep yaitu nasionalisme lebih bersifat sosiopsikologis. Menurut Kartodirdjo (1998: 29) bahwa prinsip nasionalisme adalah kesatuan, maka teknologi sosial diarahkan untuk memicu integrasi. Oleh karena itu nasionalisme menuntut kesetiaan atau penyerahan diri seseorang kepada masyarakatnya dan lebih luas lagi kepada bangsa dan negaranya. Lebih lanjut Kartodirdjo (1993: 42) mengemukakan bahwa, dalam perkembangannya nasionalisme dapat dikonseptualisasikan dalam sebuah Manifesto Politik oleh Perhimpunan Indonesia yang isinya antara lain:

1. Rakyat Indonesia perlu diperintah oleh Pemerintah yang dipilih sendiri;
2. Dalam memperjuangkan tujuan itu rakyat Indonesia tidak mengharapkan bantuan pihak lain, kesemuanya harus berdasarkan kekuatan sendiri;

3. Untuk mensukseskan perjuangan itu, maka mereka yaitu rakyat harus bersatu.

Dalam Manifesto tersebut pertama kali dijumpai konsep bangsa Indonesia, konsep negara nasion, sekaligus identitas nasional. Konsep ini semakin lengkap dan bulat dengan adanya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Secara implisit Manifesto tersebut memuat paham nasionalisme sebagai anti kolonialisme dan prinsip-prinsip: (1) kesatuan (*unity*), (2) kebebasan (*liberty*), (3) persamaan (*equality*), (4) kepribadian (*personalism*), dan (5) hasil usaha (*performance*).

Konseptualisasi metodologis tentang nasionalisme mungkin diperoleh dari sudut pandang nasionalisme sebagai fakta *sociopsychologis*. Sebagai tindakan golongan dapat dibedakan adanya tiga aspek ;(1) aspek *cognitive*, (2) aspek *goal/value-orientation* dan (3) aspek *affective*, Pendapat Levy yang dikemukakan Katordirdjo (1967: 43) bahwa ketiga aspek tersebut bila diuraikan lebih jauh, maka akan jelas fenomena-fenomena sosial mendorong kearah kemajuan suatu bangsa yakni sebagai berikut :

### **1) Aspek kognitif**

Tiap-tiap tindakan manusia mencakup beberapa unsur pengenalan yang memungkinkan orang mencari penyesuaian atau/dan perwujudan situasi yang dialaminya. Pengenalan situasi sosial di dalam masyarakat kolonial harus dicari ke belakang ke masa-masa yang mendahului Pergerakan Nasional. Pergerakan emansipasi sejak akhir abad ke XIX merupakan perwujudan dari kesadaran yang tumbuh karena situasi sosial. Raden A. Kartini sebagai pelopor emansipasi wanita dengan tulisan-tulisannya telah menunjukkan tanda-tanda perubahan jaman seperti yang dialami bangsa Indonesia pada waktu itu.

Setelah Kartini memelopori gerakan emansipasi, dorongan ke arah kemajuan bertambah pesat, terutama dalam bidang pendidikan semakin terlihat kegiatan-kegiatannya. Salah satu inti pendukung cita-cita emansipasi dalam bidang itu adalah golongan mahasiswa dari sekolah Dokter Jawa yang mencetuskan cita-cita organisasi sebagai bentuk konkrit dari solidaritas golongan. Budi Utomo sebagai organisasi pertama adalah hasil ciptaan golongan tersebut.

Hadirnya golongan asing yang memiliki kebudayaannya sendiri menimbulkan kesadaran akan perbedaan-perbedaan yang makin lama makin terasa karena diskriminasi di semua bidang-bidang kehidupan. Dengan adanya diskriminasi-diskriminasi ini rakyat menjadi sadar akan keadaan bangsa yang terkebelakang serta tidak adanya persamaan hak. Kehadiran

kolonial di bumi Indonesia menyebabkan rakyat Indonesia sadar bahwa mereka telah dikuasai. Sebagai reaksi kemudian timbul hasrat-hasrat akan kemajuan, perlunya pendidikan dan pada moment historis di dalam proses Pergerakan Nasional, kesadaran untuk melancarkan tindakan bersama guna perbaikan. Tujuan Budi Utomo mencerminkan kesadaran tersebut, oleh karena itu pada waktu Budi Utomo berdiri disambut dengan ungkapan “Si manis telah bangun” (Kartodirdjo 1967: 45).

## **2) Aspek *goal-orientation***

Aspek *goal-orientation* berhubungan erat dengan pemusatan perhatian terhadap ide teologis dari Pergerakan Nasional yang dinyatakan sebagai tujuan organisasi nasional dan yang menjadi dasar tindakan-tindakannya. Dilihat dari kriteria kebebasan dan kesatuan nasional sebagai unsur-unsur yang penting bagi nasionalisme, tujuan Pergerakan Nasional mengalami kemajuan, sebelumnya masih berkisar pada masalah sosial budaya kemudian sudah mengarah pada politik. Selanjutnya kesatuan politik Pergerakan Nasional memperoleh manifestasinya dalam mengorganisasikan diri ke dalam Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada tahun 1927, sebagai pemusatan organisasi-organisasi nasional dengan tujuan kemerdekaan politik dan ekonomi”.

Cita-cita berikutnya bagi kesatuan yang timbul kemudian diwujudkan pada Kongres Indonesia Raya dalam tahun 1937 dan Gapi tahun 1939. Sebelumnya aspirasi politik telah dinyatakan pada tanggal 28 Oktober 1928, yang kemudian dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda dengan samboyan “Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa” (Pringgodigdo 1984: 46).

## **3) Aspek *affective***

Bersama-sama dengan berbagai bentuk kesadaran dan berbangsa menghadapi situasi kolonial, bangsa Indonesia masih dapat menunjuk jawaban psikologis sebagai akibat dari kondisi-kondisi sosial di dalam masyarakat kolonial, tetapai yang tidak berhubungan langsung dengan kecerdasan, perasaan rendah diri, takut, benci, kebutuhan akan keamanan, perlindungan, perasaan kekeluargaan dan sebagainya. Faktor-faktor emosional ini menjadi semangat yang membentuk tenaga pendorong bagi Pergerakan Nasional. Menurut Kartodirdjo (1967: 48) bahwa yang dimaksud dengan faktor *affective* ialah reaksi-reaksi emosional yang biasanya ditandai oleh; simpati, antipati, benci, takut, marah, sayang dan sebagainya.

Suhartono (1994: 7) “nasionalisme timbul karena kombinasi dua faktor, yaitu subjektif berupa kemauan, sentimen, aspirasi dan lain-lain, dan faktor objektif karena kondisi ekonomi, geografi, historis, dan lain-lain”.

Dari beberapa pandangan para ahli di atas nampak terdapat perbedaan penafsiran, namun dilihat dari tujuan yang dikehendaki oleh kebangkitan nasional (nasionalisme) di Indonesia pada prinsipnya sama, yakni cita-cita mencapai kemerdekaan. Ada tiga prinsip nasionalisme di Indonesia yakni; (1) kemerdekaan (kebebasan), (2) kesatuan dan (3) kesamaan.

Bangkitnya nasionalisme di Indonesia sejak awal abad ke-20 merupakan awal terbukanya wawasan baru yang muncul dari elit-elit intelektual. Awal pergerakan nasional dapat dikatakan sebagai awal terbukanya suatu pandangan atau wawasan kebangsaan di kalangan kaum elit intelektual. Konsep wawasan kebangsaan pada masa pergerakan nasional dihubungkan dengan kolonialisme/imperialisme menimbulkan kemiskinan, kebodohan dan penderitaan rakyat (Kartodirdjo 2003: 10). Lebih lanjut dikatakan Suyatno bahwa wawasan kebangsaan dimasa pergerakan nasional dimulai dari suatu proses kesatuan politik kaum intelegensia. Mereka adalah golongan elit modern Indonesia, karena pendidikannya yang berbasis sistem pendidikan Eropa yang modern.

Munculnya elit-elit intelektual yang berpendidikan barat ini menjadi pengungkit/pendorong lahirnya kesadaran berbangsa di kalangan rakyat pribumi pada awal abad XX. Berbagai organisasi dimulai dari munculnya Budi Utomo 1908 sampai organisasi yang lahir sesudahnya mengisi kegiatan yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat dari kemiskinan, kebodohan dan kemelaratn akibat penjajahan bangsa Eropa.

Pengalaman kolektif mengisi organisasi-organisasi pergerakan dalam wujud kesadaran nasional dan wawasan kebangsaan. Ungkapan “Indonesia Merdeka”, “anti penjajah”, anti Belanda”, anti Kolonial”, kemiskinan pribumi” dan lain sebagainya adalah ungkapan reflektif dari kesadaran nasional dan wawasan kebangsaan pada waktu itu (Kartodirdjo 2003: 11). Dengan demikian nasionalisme yang di dengung-dengungkan oleh setiap bangsa dalam perspektif global adalah sebagai reaksi keras terhadap setiap penindasan, pemerkosaan atas hak-hak hidup bagi manusia lain atau bangsa lain dimanapun dia berada.

### **Nasionalisme dalam Perspektif Lokal**

Republik ini lahir dari hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia, karena itu rasa persatuan nasional dan rasa memiliki secara bersama dalam konteks prinsip nasionalisme sangat kuat. Akan tetapi memasuki era

globalisasi dan reformasi yang dilakukan setelah lengsernya pemerintahan orde baru, *euphoria* pun muncul dalam arti yang justru lebih potensial menimbulkan kerawanan persatuan nasional. Bermunculan kemudian adalah konflik-konflik horizontal (lokal), seperti berbagai bentuk kekerasan dan radikalisme atasnama agama, bom bunuh diri atasnama agama. Semuanya ini seolah melupakan nasionalisme dan menggantikan dengan semangat kelompok yang primordialistik. Partai-partai politik yang banyak bermunculan termasuk yang mencantumkan asas nasionalisme Pancasila, justru dalam sepekerjang dan aktivitas politiknya bukan hanya telah meninggalkan jiwa dan semangat persatuan nasional, bahkan meninggalkan roh Pancasila itu sendiri. Mereka membuang semangat Sumpah Pemuda dan mengubur Trisakti. Seolah-olah masing-masing kelompok merasa bahwa yang namanya Indonesia hanyalah milik kelompok saja. Semua berangkat membuat rel dan jalannya sendiri-sendiri untuk mewujudkan cita-citanya dengan terus mengibar-ngibarkan bendera primordialisme.

Sentimen primordialisme ditampilkan sedemikian rupa sehingga yang muncul bukannya politik persatuan nasional melainkan politik aliran. Banyak partai yang dibentuk kelompok tertentu bukan lagi sebagai alat perjuangan untuk menjadi bagian dari kekuatan nasional guna membangun serta ikut menggalang persatuan bangsa, justru sebaliknya hanya untuk menjadi alat mencari kedudukan, atau menyalurkan kekecewaan. Demikian pula dalam kehidupan keberagaman yang berlangsung di tengah masyarakat. Bermunculan kelompok-kelompok eksklusivisme yang bernuansa sektarian, berperilaku dan bertindak radikal karena merasa terpinggirkan. Agama yang bersih suci dan selalu mengajarkan kemuliaan, justru dipakai untuk melegitimasi kepentingan dan keinginan kelompok tertentu. Agama yang seharusnya ditempatkan di wilayah pendidikan moral untuk membina mental spiritual umatnya, justru dijadikan senjata untuk melegitimasi gerakan radikal yang merugikan umat lainnya.

Pinantun Hutasoit sebagaimana (*dalam*, Sasongko, 2005: 24) mengatakan bahwa, semua bicara tentang demokrasi, dan demokrasi memang indah, tetapi dalam pelaksanaannya justru telah meninggalkan tujuan membentuk nasionalisme yang kuat, karena selalu tersandung pada persoalan-persoalan kepentingan kelompok. Sementara itu Ivan T. Berent, pakar ekonomi dan sejarah dari Hongaria mengatakan bahwa, runtuhnya dominasi rezim komunisme internasional secara mondial yang radikal dan otoriter, yang diawali oleh runtuhnya Uni Soviet akan diikuti dengan bangkitnya gerakan kelompok-kelompok keagamaan yang radikal dan otoriter. Di sisi lain muncul pula gerakan-gerakan yang berbasis nasionalisme dengan

wawasan yang sempit, karena bukan lagi berorientasi pada sosio nasionalisme, pada kepentingan membangun negara bangsa.

Perkembangan politik yang muncul tahun 1900-san dengan gerakan-gerakan dan sentimen kedaerahan misalnya munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Gerakan Papua Merdeka di Irian Jaya, Sulawesi atau Makasar Merdeka di Sulawesi Selatan dan Federasi Kalimantan Timur, kesemuanya muncul sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap proses pembangunan secara fisik, sosial, budaya dan ekonomi yang tidak berimbang atau timpang selama masa kepemimpinan Orde Baru. Dari ketidakpuasan tersebut memunculkan suatu bentuk kesadaran atau sentimen kedaerahan yang cukup mendalam yang dilampiaskan melalui gerakan-gerakan radikalisme di berbagai daerah yang menuntut lepas secara total dari negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kalau kita membandingkan nasionalisme yang lahir pada masa pergerakan nasional dengan nasionalisme yang muncul belakangan ini, maka nampak perbedaan yang berarti. Pada masa pergerakan nasional, nasionalisme muncul sebagai sentimen dan kesadaran akan harga diri dari ketertinggalan, kebodohan dan kemiskinan akibat penindasan ideologi kolonialisme Belanda. Pada belakangan ini nasionalisme muncul sebagai perasaan sentimen dan kesadaran akan harga diri daerah yang merasa di eksploitasi oleh pemerintah pusat, kebijakan-kebijakan dalam pembangunan lebih dirasakan sebagai orientasi Jawa (Jawasentris) dibanding dengan diluar Jawa. Ketidakadilan dan ketidakseimbangan berorientasi pemerintahan antara Jawa dan luar Jawa. Bahkan perbedaan yang paling dominan adalah, nasionalisme yang lahir pada zaman pergerakan nasional lebih bersifat sebagai perekat untuk mempertahankan keutuhan bangsa (bersifat integratif), sedangkan nasionalisme sekarang lebih bersifat mengancam keutuhan dan persatuan bangsa (bersifat disintegrasi). Fenomena ini menunjukkan bahwa nasionalisme telah mengalami proses transformasi dari global ke lokal, dan dari integrasi ke disintegrasi nasional.

## **Simpulan**

Meskipun demikian, kesadaran, sentimen dan nasionalisme kebangsaan itu tidak hanya dapat dikembangkan secara subjektif dan individu atau kelompok tertentu, namun dapat pula dikembangkan secara struktural, yaitu melalui kebijakan politik dan strategi politik. Dalam hal ini sangat terkait dengan kekuasaan, sebab politik itu sendiri terkait dengan kekuasaan, sedangkan kekuasaan selalu berurusan dengan pengendalian negara. Jika demikian halnya, munculnya gerakan nasionalisme baru seperti sekarang ini,

dianggap terkait dengan kekuasaan dan politik. Oleh sebab itu, jika nasionalisme dalam kerangka nasional dikaitkan dengan nasionalisme dalam perspektif lokal atau bersifat kesukuan yang keluar dari kerangka nasional itu sendiri, oleh pemerintah pusat dan hukum yang berlaku dianggap sebagai gerakan “sprataisme” yang mencoba merongrong integrasi bangsa. Meski demikian, perlu pula dipahami bahwa gerakan yang dianggap sparatis itu kemunculannya lebih disebabkan oleh ketimpangan kekuasaan dan politik. Oleh sebab itu, baik nasionalisme, kekuasaan maupun politik haruslah ditempatkan dalam kerangka yang sejalan dengan kepentingan nasional, dan tetap dipandang sebagai suatu hal yang bersifat dinamis.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Roeslan. 1964. *Penggunaan Ilmu Sejarah*. Bandung : Prapanca.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Nasionalisme, Etnisitas dan Islam Dalam Politik Kontemporer* (Makalah Seminar nasional Sejarah Prog. Studi Ilmu Sejarah UNS).
- Fukuyama, Francis. 2004. *The End Of History and The Last Man* (Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal). Yogyakarta C.V Qalam
- Hasbawm, E.J 1992. *Nasionalisme Menjelamg Abad 21*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Hans, Kohn. 1984. *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*. Jakarta : Erlangga.
- J.A., Denny.2002 *Nasionalisme Dulu Hingga Era Reformasi*. (Kompas edisi 24 Maret).
- Kartodirdjo, Sartono. 1967. *Kolonialisme dan Nasionalisme Indonesia Abad XIX – XX*. Yogyakarta : Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fak. Sastra UGM
- \_\_\_\_\_. 1993. *Pembangunan Bangsa*. Yogyakarta : Adutya Media.
- Kartodirdjo, Suyatno. 2003. *Perubahan Kurikulum dan Revitalisasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan*. Historika, Volume 1, No 1, Juli 2003 UNS.

- Maarif., Ahmad Safii. 1989. *Peran Sejarah dalam Perkembangan Bangsa Indonesia*. (Makalah Dies Natalis IKIP Wates). Yogyakarta.
- Naisbitt, John. 1994. *Global Paradox*, New York, William Morrow.
- Pringgodigdo, A.K. 1984. *Sejarah Pergerakan rakyat Indonesia*. Jakarta : Dian Rakyat
- Sasongko, Haryo, 2005. *Bung Karno Nasionalisme dan Demokrasi*. Jakarta Pustaka Grafika.
- Sargent, Lyman Tower. 1987. *Ideologi-ideologi Politik Kontemporer . Sebuah Analisis Komparatif*. (Edisi terjemahan oleh Heri Stanggang dan Herman Sinaga) Jakarta : Erlangga.
- Suhartono. 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi (1908 – 1945)*. Jakarta : Pustaka Pelajar.